

ISSN : 2088-5628



# Jurnal Kesehatan dan Pembangunan

Vol. 3, No. 6, Juli 2013

Diterbitkan dua kali dalam setahun pada bulan Januari dan Juli  
berisi artikel tentang kesehatan dan pembangunan

**Penasehat :**

Yayasan Mitra Adiguna Palembang  
Ketua STIKES Mitra Adiguna Palembang  
(Diana H. Soebyakto, Mkes)

**Pimpinan :**

Bambang Bemby Soebyakto, MA, PhD

**Dewan Redaksi :**

Prof. DR. Syamsurijal, AK  
Prof. DR. Taufiq Marwa, MSi  
Prof. DR. Bernadette Robiani, MSc  
DR. Azwadi, MSi  
Anna Yulianita, SE, MSi  
Ns. Evi Royani, SPd, SKep  
Ns. Leni Wijaya, SKep  
Yuli Bahriah, SST, SKM  
Nurbaity, SST

**Anggota Redaksi :**

Ns. Sherly Widianti, SKep  
Ns. Alliyah, SKep  
Ns. Zakina Arlina, SKep  
Ns. Drajad Sandika, SKep  
Riko Sandra Putra, SKep  
Rohani, SST  
Pradiva Dwi Lestari, SST, SKM  
Vera Yuanita, SST  
Noviani Elsira, SST  
Italia, SPd

**Sekretariat :**

Erni Sridika, SE  
Reni Saswita, SST  
Yoan Marini, SST  
Harmis Julita  
Yuli Marantika

**Alamat Redaksi :**

STIKES MITRA ADIGUNA PALEMBANG  
Kompleks Kenten Permai Blok J No. 9-12  
Bukit Sangkal Kenten- Palembang 30114  
Telp/ Fax : (0711) 818326  
Website : [www.mitra-adiguna.ac.id](http://www.mitra-adiguna.ac.id)

## GLOBALISASI MENOLONG ORANG MISKIN?

Bambang Bemby Soebyakto  
Fakultas Ekonomi – Universitas Sriwijaya  
Palembang

### Abstract

In the early 1980s, IMF and the World Bank have launched a new treatment on the way how to solve the debt problems of developing countries in several part of the World. The way they have offered was the renegotiation of those Developing countries' debt. Of course this agreement is a bit different when compared with what has been declared by the Bretton Woods which is known as "economic reconstruction". The IMF and World Bank ways' in fact have damaged the economic condition of developing countries and led these caused of mass poverty among people in LDCs.

**Keywords:** renegotiation debts, economic reconstruction, mass poverty, LDCs, Structural Adjustment Program, Export – Oriented Production.

### 1. Pendahuluan.

Globalisasi yang terjadi saat ini ternyata semakin merusak peradaban bangsa-bangsa negara berkembang. Upaya yang dilakukan Bank Dunia dan IMF dalam memperbaiki dan menyusun ulang hutang negara-negara berkembang (LDCs) ternyata justru menjadi kan LDCs mengalami kehancuran diberbagai segi. Daya beli masyarakat menurut drastic, selain itu banyak rumah sakit modern yang seharusnya memberikan manfaat yang besar pada rakyat hanya menjadikan rakyat terkelompok-kelompok. Rumah sakit modern lebih memihak pada orang-orang yang "mampu" membayar saja. Beratus ribu anak-anak kecil tidak dapat masuk sekolah yang terendah sekalipun.

Dilain pihak, bukan hanya fasilitas public yang tidak dapat dinikmati oleh rakyat –rakyat tak mampu, tapi juga jenis penyakit yang berjangkit ternyata semakin banyak macamnya. Hal ini bertolak belakang dengan apa yang sudah didengungkan oleh lembaga Bank Dunia, dimana tujuan utama rekonstruksi

hutang adalah untuk menghapuskan ke – miskinian di LDCs. Demikian pula perkebunan -perkebunan yang di buka secara massal justru tidak mengakomodasi petani kecil agar maju dan berkembang tetapi memberikan keuntungan pada konglomerat untuk semakin memperluas usaha perkebunan tersebut (Chossudovsky, 2007).

Tulisan ini mencoba memberikan gambaran dimana globalisasi yang saat ini sedang terjadi dan berjalan memang tidak sama sekali memberikan keuntungan terutama bagi LDCs yang sebagian besar belum dan tidak dapat menghadapinya.

### 2. Pembunuhan Ekonomi Nasional.

Penyesuaian struktural (structural adjustment) secara kondusif merupakan pembunuhan kegiatan ekonomi melalui manipulasi pasar secara global. Keadaan ini dapat terli-hat dari upaya mengalirkan tenaga kerja trampil dan perbudakan pada semua struktur ke-giatan ekonomi dibanyak negara berkembang diseluruh dunia. Negara berkembang di dunia seperti Afrika, Asia

Tenggara dan bagian selatan yang subur menjadi lading perke bunan besar milik konglomerat-konglomerat dunia.

Rekonstruksi ekonomi yang dibiombing dan didasarkan pada institusi finansial yang berpusat di Washington, menolak dan menghapus keberadaan negara dalam membangun ekonomi nasional mereka. Perekonomian nasional LDCs secara makro telah berubah menjadi ekonmi terbuka dan terpuruk sebagai negara yang "hanya" menyediakan negara me reka sebagai penyedia tenaga kerja dan sumber daya alam yang "murah" saja. Selain itu kebijakan IMF yang memberikan obat pada perekonomian (economic medicine) memberi kan tekanan harga komoditi dunia akibat dari penciutan peran pasar domestik menjadi glo bal.

Intisari system ekonomi global sebenarnya mengatur berbagai peranan LDCs dalam perdagangan internasional, produksi dan keuangan kedalam posisi yang dapat diupayakan untuk kepentingan dunia. Pertumbuhan penduduk dunia yang semakin pesat akan menye babkan bahwa penduduk dunia berkembang tumbuh mencapai lima miliar orang. Dilain pihak, jumlah negara – negara kaya yang hanya mempunyai penduduk sebesar 15% dari jumlah penduduk dunia, menguasai 80% total pendapatan dunia. Disisi lain, 60% dari to tal penduduk dunia bermukim di negara-negara miskin (Samir, 1990). Lebih lanjut, bahwa negara-negara miskin tersebut dengan penduduk sekitar 3.5 miliar penduduk menerima hanya 6.3% dari total pendapatan dunia. Jumlah ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan GDP negara Perancis (Chossudovsky, 2007). Sejak tahun 1990, dibanyak negar-negara yang menghutan pada negara kaya, pandapatan nyata yang mereka terima menurun hing ga lebih dari 60 persen.

Globalisasi tidak hanya menjamah masalah – masalah perdagangan maupu produksi tapi juga merambah dalam keuangan negara berkembang. Globalisasi juga

menyebabkan biaya hidup (cost of living) secara signifikan meningkat; dan devaluasi mata uang negara berkembang juga selalu menyebabkan masalah dolarisasi pada harga-harga domestik. Per tambahan nilai pada harga bahan makanan mengalami peningkatan akibat bahan dasar ba yak yang dihargai dengan dollar. Harga tersebu juga diakibatkan adanya dualisme yang terjadi pada struktur upah dan harga tenaga lerja yang berbeda antara negara kaya dan ne gara miskin.

Pada negara berkembang, lebih dari 60 % pendapatan mengalir pada kelompok kaya yang hanya 20% dari seluruh total populasi. Dibanyak negara miskin dan menengah LDC yang 70% rumah tangga pedesaan hanya menerima antara 10-20% saja dari pendapatan keseluruhan. Kenyataan ini tak dapat dipungkiri keberadaannya karena setiap pembukaan lahan – lahan perkebunan besar baru, hampir 80% petani di pedesaan tidak mempunyai akses untuk ikut serta dalam kegiatan ekonomi perkebunan tersebut. Perbedaan ini sema-kin memperlebar jurang kesenjangan perdagangan komoditi perdagangan dan kekalahan dalam kompetisi dalam kancah internasional.

Pembagian kerja dalam produksi yang diorganisasikan oleh perusahaan multi-nasio nal secara terpe ncar diseluruh bagian dunia menyebabkan banyak negara – negara yang pilitik negaranya keras akan menyebabkan banyak sumber daya yang mengalir ke negara yang lebih siap dan kuat (Thoha, 2001). Pembagian kerja yang timpang menyebabkan ter jadinya migrasi pekerja secara besar dan global di jagat ini. Pasar bebas memberikan mak na bahwa setiap orang atau individu dapat bergerak secara leiuasa keluar-masuk dari satu negara ke negara lain. Globalisasi telah dengan cepat diikuti dengan tumbuhnya tehnologi informasi yang menyebabkan berita pasar menjadi terbuka dan ini memberikan masukan yang sangat berharga bagi pekerja dis eluruh dunia

untuk keluar – masuk pasar secara bebas antar negara.

Gerakan modal dan peluang kerja begitu terbuka lebar dan akhirnya akan menarik tenaga kerja terampil dan menguasai teknologi kerja pada banyak perusahaan besar di berbagai negara yang memang secara kapasitas lebih baik dari negara yang tidak siap dalam menghadapi peristiwa tersebut. Konsekwensinya adalah bahwa negara yang ketinggalan dalam mempersiapkan tenaga kerjanya akan terlempar keluar pasar.

Selain masalah ketenaga kerjaan yang memang semakin hari semakin mengancam keberlangsungan hidup rakyat banyak, maka perubahan sistem upah dan juga kebutuhan terhadap keterampilan yang semakin tinggi akan menyebabkan pengangguran penduduk dari kalangan angkatan kerja yang derajat pendidikannya rendah akan semakin tinggi. Kesulitan angkatan kerja kurang terampil dan terdidik tersebut masuk ke pasar formal akan menyebabkan terhalang dan terhambatnya proses transformasi ekonomi dan sosial. Hal ini kemungkinan besar akan menyebabkan gelombang frustrasi sosial secara nasional yang pada akhirnya dapat menciptakan instabilitas sosial-politik nasional.

Proses globalisasi di dunia sebenarnya dapat diikuti dari sejarah perdagangan bebas masa lampau yang terjadi di Asia, khususnya Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda pada awal abad ke XIX sudah membolehkan pengusaha asing untuk menanamkan modal mereka di negara kita (Hall, 1988). Modal-modal asing yang ditanamkan oleh pengusaha asing dan bukan orang Belanda, terutama pada pertambangan minyak dan perkebunan seperti: karet, tebu dan teh. Kemudian diikuti oleh pengusaha asing yang menanamkan modal mereka di pertambangan timah dan juga perkebunan tembakau.

Kesempatan emas tersebut benar-benar dimanfaatkan secara maksimal oleh pengusaha asing yang memang melihat bahwa prospek investasi itu akan memberikan

keuntungan yang berlimpah bagi negara mereka. Pembukaan sector-sector usaha oleh pengusaha asing tersebut sudah tentu diikuti dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan tenaga kerja terampil dari manca negara. Arus tenaga kerja terampil tersebut sampai sekarang terus mengalir masuk sejalan dengan semakin tingginya arus investasi asing ke negara Indonesia. Kebutuhan dalam negeri terhadap pekerja asing yang semakin meningkat sejalan dengan kemajuan teknologi; menyebabkan peluang pekerja domestik masuk pasar semakin sulit akibat tidak mampu bersaing dengan pekerja asing tersebut (Hill, 1996).

Bagi negara berkembang seperti Indonesia dan juga negara lainnya yang memang memiliki penduduk usia kerja yang tinggi, maka perbedaan keterampilan yang dimiliki akan menyebabkan upah yang mereka terima juga jauh lebih rendah. Pendapatan pekerja asing yang 10 – 15 kali lipat dibanding dengan yang diterima pekerja local menyebabkan terjadi defisit sektor jasa yang cukup besar walaupun tidak semuanya berkaitan dengan masalah pekerja asing. Defisit negara dalam sektor jasa terkait dengan pekerja asing sekitar 5 milyar US\$ pada tahun 1997 (Effendy dalam Nasution, 1999).

### 3. Pandangan terhadap Globalisasi.

Berakhirnya perang dingin antara negara blok kapitalis dan komunis, diharapkan merupakan momentum berdirinya dunia baru yang lebih makmur serta bebas dari ketakutan dan bayang-bayang meletusnya perang dunia ketiga. Dunia baru yang banyak diharapkan orang banyak diharapkan akan memberikan nuansa baru yang lebih segar, terutama agar terciptanya perdagangan dunia yang bebas dari intrik dan dikte negara lain, dan pada gilirannya akan menciptakan kemakmuran bagi manusia.

Fukuyama (2005) menyatakan bahwa seleksi sejarah memperlihatkan bahwa

proses berakhirnya persaingan kapitalis dan komunis, dunia baru yang diharapkan akan dibang un dengan ideologi kapitalis melalui agama modernisasi dari Bank Dunia dengan peralat an “*perangkat gerejanya*”, dimana lembaga IMF sebagai gereja – gereja kecil (chapel).

Banyak para ahli ekonomi yang sangat percaya bahwa modernisasi kapitalisme diba nyak negara berkembang akan menciptakan pasar bebas dan globalisasi yang akan mem berikan kemakmuran. Optimisme yang sedemikian tinggi itu ternyata masih saja ada ahli yang berpendapat lain tentang globalisasi tersebut (Holley dalam Fukuyama, 2000). Kebe rattan beberapa orang tersebut terhadap rasa pesimistis akan keberhasilan globalisasi kare na hal-hal sebagai berikut:

***Globalisasi merupakan Kapitalisme Spekulasi***, terutama yang berkaitan dengan sektor keuangan, menunjukkan bahwa perekonomian dijalankan oleh para spekulasi pasar uang dan pasar modal. Para spekulasi tersebut bertindak sebagi “*hakim*” ber kekuasaan penuh untuk menghukum negara-negara yang tidak pro pasar; sehing-ga ketergantungan negara berkembang pada valuta asing menjadi sangat tinggi. Setiap devisa yang dikumpulkan dengan susah payah didalam negeri akan menga lir begitu saja keluar negeri.

***Globalisasi Anti Negara***, peran pemerintah negara – negara berkembang banyak yang hilang sebagai pencipta dan pendistribusi kemakmuran di negara mereka. Ke kuasaan ini memang akan hilang pada saat globalisasi diberlakukan diseluruh du-nia (Ohmae,1991). Kekuasaan dan peran negara akan semakin sempit dalam me- lakukan segala aktivitas ekonomi, oleh sebab itu banyak BUMN yang akhirnya di swastanisasikan kepihak bermodal kuat. Perlakuan tersebut akibat efisiensi dan profitabilitas menjadi tolok ukur utama perekonomian

pasar bebas, sehingga segala aspek berkaitan dengan distribusi, pemerataan dan kesejahteraan di nomor dua kan dan bahkan harus dikorbankan (Thoha, 2001).

***Globalisasi sebagai Kompetisi Menghancurkan***, proses ini mengakibatkan per- saingan yang pada akhirnya menghancurkan semua system yang berlaku dalam ne gara. Negara yang mampu memproduksi dan memasarkan produk-produk bermu tu dengan segala pelayanan purna jual yang terbaik akan selalu memenangkan se tiap persaingan atau kompetisi. Setiap perusahaan akan semakin meningkatkan ca ra guna mempertahankan dan bahkan meningkatkan daya saing produk dengan tehnologi yang semakin canggih. Kemajuan tehnologi pada akhirnya akan mening katkan efisiensi sehingga penggunaan tehnologi akan mendominasi daripada tena ga kerja manusia apalagi yang tidak mampu mengikuti perkembangan tehnologi tersebut dan kurang terdidik serta tidak terampil.

***Globalisasi mengurangi Kesempatan Tenaga Kerja***, kemajuan tehnologi yang sangat tinggi sudah tentu akan lebih mempercepat proses produksi dengan memer lukan waktu yang lebih cepat, sehingga barang dan jasa yang dibutuhkan masyara kat dapat cepat dipenuhi. Keadaan seperti ini sudah tentu akan semakin memperke cil kesempatan manusia sebagai tenaga kerja berpartisipasi aktif dalam proses pro duksi. Masalah yang akan dihadapi oleh banyak negara adalah isu pengangguran yang memang dirasakan meningkat dari hari ke hari. Hal lain yang harus diperhati kan adalah masuknya pekerja-pekerja asing yang lebih trempil dan terdidik untuk mengambil alih “*lowongan kerja*” yang “*terpaksa ditinggalkan*” oleh pekerja lokal yang ada.

**Globalisasi menyebabkan Kemiskinan,** proses globalisasi akan memberikan keuntungan yang sangat besar pada perusahaan-perusahaan multinasional, pemilik modal besar dan manajer maupun profesional dan para kroni dalam pemerintahan negara yang bersangkutan. Keadaan ini semakin parah dengan berfungsinya Bank Dunia dan IMF dalam mengucurkan dana selalu juga mengharuskan negara untuk memberikan kemudahan tersedianya faktor produksi seperti bahan bakar, listrik yang sangat murah “dengan” menekan masyarakat membeli bahan – bahan tersebut dengan harga “tinggi” melalui alasan “bersubsidi” dan sebagainya. Semua san diwara pemerintah tersebut dalam mengakomodasi kepentingan negara adidaya se bagai menyokong globalisasi jelas akan semakin memojokkan masyarakat miskin yang jumlahnya semakin meningkat setiap tahun.

**Globalisasi Menciptakan Individualisme,** paham yang dianut globalisasi adalah kapitalisme seutuhnya yang pada akhirnya akan menciptakan pola hidup individualis dengan kompetisi yang tidak lagi memperhatikan solidaritas sosial antar ma syarakat dalam negara. Paham yang dianut globalisasi mengharuskan agar upaya mencapai kemakmuran bersama melalui prinsip perdagangan pasar bebas dan pa sar uang mendunia yang menyampingkan norma kehidupan dan pandangan hidup bangsa. Yang ditakutkan adalah bahwa individualisme yang berlebihan akan men ciptakan budaya acuh tak acuh dimana orang tidak lagi urusan dengan manusia lain.

**Globalisasi upaya Imperialisme Budaya,** globalisasi secara nyata akan membawa dan menyebarkan faham baru yang bersifat sombong, tidak peduli dengan orang lain, liberal akan mengenyampingkan nilai-nilai budaya tradisional yang dianut

sua tu negara. Kemajuan tehnologi informasi akibat globalisasi akan menjadi alat uta ma menyebar-luaskan budaya bebas negara barat ke dunia berkembang tanpa ha-langan apapun. Penjajahan budaya ini akan dan sudah menyebar luas sampai kede sa-desa melalui DVD, Global TV network, Blackberry, notebook dan alat lain yang dapat dibawa kemana-mana, maupun bentuk lain yang menyebabkan mero sotnya moral bangsa tanpa dapat dicegah dan ditanggulangi.

**Globalisasi sebagai Dorongan munculnya Gerakan Baru dalam Negara,** globali sasi juga ditenggarai merangsang munculnya gerakan – gerakan sempalan dengan dalih pembaharuan dan menolong kaum miskin. Tumbuhnya gerakan-gerakan ter sebut dilandaskan pada populisme, nasionalisme dan fundamentalisme yang kese muanya merupakan “tanda” bangkitnya sentimenisasi terhadap negara akibat pe-merintah lokal dianggap tidak mampu mensejahterakan rakyat mereka. Gerakan – gerakan tersebut biasanya ingin suara mereka didengar oleh pemerintah baik lokal dan internasional dengan cara yang membahayakan orang banyak. Kejadian seper ti serangan pada Pusat Perdagangan Dunia (World Trade Center/WTC) dan peristiwa wa lain merupakan gambaran nyata munculnya sempalan-sempalan tersebut.

#### 4. Globalisasi dan Penciptaan Kemiskinan.

Kebijakan yang dilakukan lembaga dunia seperti Bank Dunia, WTO dan IMF pada bidang ekonomi memang diamati justru membawa kemiskinan secara massa dibanding kan manfaat positif yang peroleh. Proses globalisasi yang menyebabkan semakin tinggi jumlah kemiskinan yang dirasakan masyarakat dapat dilihat dari 2 (dua) cara pandang, yaitu: Program Penyesuaian Struktural (Struktural Adjustment Program)

atau SAP dan Produksi berorientasi Ekspor (Export-oriented production).

#### 4a. Structural Adjustment Programs/SAP.

Upaya Bank Dunia dan IMF serta WTO dalam meluncurkan ide-ide mereka guna berlakunya globalisasi didunia ini tidak berhenti begitu saja melalui anjuran dan kesepakatan saja, melainkan juga dengan memberlakukan aturan-aturan baru. Dalam kegiatan berlakunya aturan baru tersebut, WTO dijadikan salah satu patokan yang harus dianut ne gara-negara di dunia. Hal ini dipertegas oleh Ruggiero (dalam Thoha, 2001) yang membe berkan bahwa WTO akan menjadi dasar perundangan (konstitusi) baru bagi perekonomi- an global.

Peraturan baru yang bersifat konstitusi tersebut diberlakukan dalam upaya menghalangi segenap upaya yang ingin menghalangi proses berlakunya globalisasi tersebut. Konstitusi baru tersebut sebenarnya memaksa agar negara – negara berkembang yang menga- nut faham demokrasi harus patuh agar tidak menyimpang dengan bertindak diluar aturan yang berlaku. Instrumen yang mengatur secara sepihak dan sangat mengikat itu dikenal dengan nama ‘*structural adjustment programs /SAP*’ yaitu suatu program yang mengatur kem bali perekonomian nasional semua negara di dunia agar lebih tepat dan sesuai deng an faham / ideologi perdagangan bebas. Persekusi tersebut antara lain bahwa negara mis kin yang tidak dapat ikut dalam proses globalisasi “dapat dan harus”berhutang pada lem- baga yang mereka tentukan yaitu Bank Dunia dan IMF.

Beberapa persyaratan yang ditentukan dalam SAP antara lain(Thoha: 2001):

- Penghapusan seluruh tariff yang diberlakukan pada industri kecil lokal agar tetap mampu bertahan hidup menghadapi perusahaan besar global.
- Penghapusan peraturan-peraturan dalam negeri yang dianggap dapat menghambat keluar-masuknya investasi asing.

- Dihapuskannya seluruh pengawasan harga terhadap kebutuhan pokok tetapi tidak control atas upah tenaga kerja.

- Menghambat kelancaran akses pada pelayanan public terhadap banyak rumah – ru mah sakit, perawatan medis, jenjang pendidikan tertentu yang semuanya di privat isasi (dengan nama dan kerjasama pihak asing) sehingga orang miskin dan mau-pun menengah yang tidak dapat merasakannya.

- Program-program yang berbau kerakyatan di “kebir” agar kemandirian rakyat guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran tidak berkembang.

- Perekonomian secara keseluruhan diatur ulang sehingga produksi ekspor nasional semua negara ditekan agar negara-negara tersebut beralih mengimpor barang ke butuhan hidup.

Paksaan-paksaan yang dilakukan dibanyak negara, dalam upaya memberlakukan globalisasi melalui dengan aturan yang ditetapkan dalam SAP, telah menghancurkan sis tem kehidupan perekonomian negara berkembang secara keseluruhan. Sebagai contoh, pengaturan pada lahan pertanian yang tadinya mengembangkan tanaman-tanaman kebutuhan konsumsi tradisional diubah secara dratis dengan komoditi keperluan negara maju, seperti jagung rakyat menjadi jagung manis yang dibutuhkan seluruh rumah makan barat seperi Mc Donald, Kentucky Fried Chicken, dan banyak lagi jenisnya.

Lebih lanjut, adalah juga banyaknya petani-petani dengan modal kecil (gurem) tergantung pada korporasi-korporasi besar menjadi semakin miskin dengan upah sangat ke cil akibat dieksploitasi oleh tuan-tuan tanah yang sama sekali tidak tahu dimana letak per kebun mereka (absentee landlord). Model agribisnis seperti itu menekan petani lokal da lam memproduksi tanaman pangan yang sesuai bagi konsumsi penduduk, dari tanaman pangan menjadi tanaman yang lebih laku dijual secara

global, seperti bunga-bunga dalam pot, kapas, dan kopi maupun sayuran eksotik.

Sistem korporasi yang mendunia ini, memang menghancurkan system kehidupan ma syarakat dunia berkembang menjadi semakin miskin dan terpuruk. Tenaga kerja yang ter sedia banyak di negara berkembang menjadi "mubazir" karena selain ketidakmampuan mereka masuk dan ikut dalam kegiatan korporasi tersebut; juga karena mereka memang tidak terampil dan terdidik dengan cukup guna memenuhi kebutuhan dunia global. Mereka yang terpuruk itu akhirnya menjadi "pelarian" ke kota-kota besar untuk mencari kehidupan lain.

Terjadilah proses urbanisasi yang akan membuat kota-kota besar menjadi tempat penampungan yang mengakibatkan kota-kota tersebut tak sanggup memberikan fasilitas memadai bagi mereka. Globalisasi jelas menghilangkan segala program "swasembada" apa pun yang dilancarkan negara berkembang. Dalam perkembangannya, ternyata banyak bukti empiris bahwa, globalisasi mengabaikan kebutuhan rakyat kecil yang memang sengaja tidak disediakan oleh pasar global. Kebutuhan pangan yang memang tidak disalurkan secara layak dan adil, menyebabkan banyak rakyat diseluruh dunia yang melamun dengan tangan kosong dan perut yang juga kosong.

Pendek kata bahwa, produk IMF dan Bank Dunia pada banyak negara justru menciptakan ketergantungan finansial dan moneter yang menimbulkan pula budaya skeptis – akan upaya keberhasilan mengentaskan kemiskinan. Pembangunan ekonomi di banyak negara terutama Afrika dan Asia serta Amerika Latin dan juga negara-negara dibelahan selatan lainnya yang terhilit hutang miyaran dan bahkan triliunan dollar; akibat ketidakmampuan negara-negara tersebut mengembalikan hutang dan bunga pinjaman yang semakin meningkat. Devaluasi mata uang negara – negara tersebut

menciptakan kemiskinan se cara luar biasa yang menyebabkan mata uang negara itu tidak mempunyai nilai tukar sepa dan dengan mata uang dollar Amerika.

Globalisasi memberikan "kesempatan dan kewenangan" pada pemerintah setempat yang antek Bank Dunia dan IMF menjadi milyader-milyader yang semakin melimpah harta kekayaannya. Pembangunan ekonomi dengan biaya tinggi sudah tentu akan mempengaruhi pendapatan masyarakat yang semakin hari semakin mengecil. Hutang masyarakat pada bank-bank dalam negeri yang berupa kredit konsumsi semakin meningkat yang dibarengi dengan ketidakmampuan mereka membayarnya.

Bank Dunia yang pada awal penerapan program globalisasi menyatakan bahwa usaha yang dilakukannya untuk mengentaskan kemiskinan dan pelestarian lingkungan hidup, justru membuat 100 negara mengalami penyusutan pendapatan pada sekitar 1,6 milyar orang. Jumlah pendapatan tersebut ternyata hanya naik sedikit dibandingkan tahun sebelum globalisasi dicanangkan secara gencar (Rich dalam Widyamartaya, 2003). Jumlah orang yang menerima pendapatan dibawah US\$ 1,- perhari meningkat bratis dari 1,197 juta pada tahun 1987 menjadi 1,214 juta pada tahun 1997. Selain itu, usia harapan hidup di 33 negara mengalami kemerosotan yang sangat menyedihkan (Widyamartaya, 2003).

Kemiskinan yang merajalela dibanyak belahan bumi akibat berlakunya globalisasi telah menciptakan kelompok "komprador ekonomi" yang berkuasa dan berwenang "menghisap" rakyat dengan berbagai cara yang dihalalkan. Banyak pembangunan yang dilakukan hanya akan menghimpun pengusaha kaya untuk dapat bagi-bagi kue pembangunan yang sama sekali tidak menyentuh rakyat banyak (Aditjondro dalam Hancock, 2005).

Investasi sebenarnya adalah upaya untuk mengembangkan produksi agar hasilnya dapat dinikmati orang banyak, tetapi nyatanya hanya memberikan kesempatan bagi orang-orang yang dekat dengan penguasa untuk berbagi rejeki. Dari sinilah budaya korupsi di banyak negara di belahan selatar tumbuh subur, dimana penyelewengan penggunaan dana masyarakat bukan sebatas oknum orang per orang tapi mengakar sampai kroni dan partai politik penguasa (Aditjondro, 2003).

Indonesia sebagai salah satu negara yang juga diglobalkan oleh Bank Dunia dan lembaga asing lainnya, merupakan negara yang memang sudah dapat dikatakan rapuh. Kerapuhan negara Indonesia lebih banyak disebabkan oleh kondisi dalam negeri yang tidak stabil sehingga banyak investor asing yang tidak mau menanamkan modal mereka di ham pir berbagai sector. Berapa banyak tenaga kerja yang notabene tidak terampil dan terdidik baik harus menganggur akibat ketidakmampuan beberapa industri asing yang beroperasi di Indonesia gulung tikar. Kehancuran pabrik – pabrik seperti NIKE yang merumahkan lebih dari 1500 tenaga kerja mereka. Belum lagi PANASONIC yang harus hengkang dan pindah ke Malaysia dan masih banyak lagi. Apabila rata-rata tenaga kerja pada setiap perusahaan mempekerjakan minimal 1500; maka apabila ada sekitar 50 perusahaan sejenis dapat dihitung berapa banyak manusia kehilangan pekerjaannya.

Sebagai salah satu yang dulunya sangat kuat di belahan Asia Tenggara, Indonesia saat ini sudah menjadi negara dengan negara dengan biaya tinggi untuk berbisnis atau menanamkan modal mereka (Backman, 2008). Banyak kebijakan ekonomi yang diambil ditetapkan atas dasar kepentingan kelompok dan bukan untuk mensejahterakan rakyat. Penyediaan lahan dilakukan dengan melakukan perampasan hak tanah rakyat dengan ganti rugi yang membuat orang-orang yang terlibat

didalamnya semakin kaya raya. Perlakuan tersebut dapat dilihat dari biaya tinggi pada pembiayaan legalisasi dan juga pungutan lainnya.

#### 4b. Export – oriented Production.

Banyak negara di belahan bumi bagian selatan, yang masih mengharapkan perekonomian mereka digantungkan pada ekspor produk pertanian, yang pada umumnya rentan & menurunkan nilai produk tersebut. Negara-negara berkembang di dunia abad ke XXI saat ini, masih banyak yang bergantung pada produk sector pertanian mereka, yang sebenarnya belum layak ditengahkan pada era pasar global. Pertanian negara berkembang yang pada umumnya menganut model pertanian yang diversifikasi dalam skala kecil; dalam era global harus merubah model tersebut menjadi ekspor industrial, yang digerakkan oleh perusahaan atau korporasi global yang sarat teknologi dan modal.

Petani di negara berkembang sangat tergantung pada tanah, yang keberadaannya semakin sempit dan pembagiannya kecil, akibat berdirinya korporasi atau perusahaan global yang dengan mudah dapat mengambil alih tanah tersebut secara mudah akibat pengusaha bermodal besar berkolusi dengan oknum pemerintah yang berkuasa. Peran tanah bagi sebagian penduduk negara berkembang, merupakan sarana vital guna memproduksi bahan pangan baik untuk keluarga, dan juga masyarakat umum secara sederhana. Bahar pertanian pokok untuk hajat hidup dikembangkan selama bertahun-tahun dengan variasi lokal yang selama ini mampu menghidupi mereka.

Faham global tidak senang dengan pola bercocok tanam yang dilakukan oleh petani yang dilakukan oleh petani; oleh sebab itu harus diubah dengan pola global yang diharapkan akan memberikan keuntungan sepiha secara cepat. Pola global ini dilakukan dengan dukungan penuh melalui peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, WTO dan IM

bahkan negara Amerika Serikat (Widyamartaya, 2003). Keinginan pasar global yang difasilitasi dengan peraturan dan ideologi EOP (export-oriented production) tersebut menimbulkan kesesatan berupa dalih sebagai berikut (Widyamartaya, 2003):

- Kesejahteraan masyarakat dan masa depan manusia sangat tergantung pada upaya pertumbuhan ekonomi dan perdagangan berdasarkan pada deregulasi dan privatisasi sebagaimana yang dilakukan perusahaan global yang bermodal besar.
- Kapasitas produksi dan upaya pembangunan hanya dapat dilakukan dengan cara memberikan keleluasaan pada investasi asing masuk ke negara berkembang.

Apa yang diteorikan oleh badan dan institusi dunia tersebut ternyata sama sekali berolak belakang. Kenyataannya, teori tersebut benar-benar hanya menguntungkan banyak perusahaan, atau korporasi global. Pertumbuhan ekonomi yang biasanya diukur atas dasar produk domestik kotor, dan produk nasional kotor, hanya mengukur sejumlah peningkatan dari nilai kegiatan pasar dari semua produk ekonomi dengan cara mengkonversi komo ditas dan berbagai jasa yang dibayarkan. Oleh sebab itu semakin banyak hal yang sebenarnya tidak dapat diperhitungkan; seperti peningkatan kebutuhan militer, rumah pemasyar katan, serta penggundulan hutan serta pembuangan limbah beracun, semuanya masuk dan dihitung dalam GDP dan GNP.

Globalisasi pada upaya menyediakan bahan baku guna pasar global sebenarnya juga penyebab kerusakan ekologi yang banyak menimpa LDCs sebagai tempat yang memang masih subur dengan aneka tanaman hutan yang sangat laku dijual dipasar. Pasar global sudah tentu memerlukan banyak fasilitas-fasilitas yang dapat memperlancar arus lalu lintas komoditi berupa barang dan jasa sampai ke konsumen. Oleh karena semakin meningkatnya

kebutuhan terhadap tersedianya sarana dan prasarana itu menyebabkan banyak terjadi pembukaan lahan atau tanah guna dibangun pelabuhan, bandara, dan jaringan listrik serta segala sesuatu yang harus menunjang keberhasilan deklarasi pasar global itu.

Selain itu, kebutuhan terhadap alat transportasi memerlukan banyak bahan bakar dan kebutuhan akan minyak dari dalam bumi; hal ini akan merusak iklim, lapisan ozon serta pencemaran lingkungan. Ironisnya hampir sebagian besar negara belahan selatan yang kaya akan hasil hutan dan alamnya; merupakan penyumbang terbesar kebutuhan seluruh negara belahan utara yang sangat kaya. Globalisasi yang terjadi di belahan bumi selatan memang dirasakan sangat merusak dan menghancurkan pola kehidupan rakyat yang telah berjalan berabad abad. Kehancuran global juga dirasakan oleh bangsa Indonesia, dimana jumlah pengangguran semakin meningkat setiap tahunnya, yang menyebabkan tingkat kemiskinan masyarakat juga meninggi. BPS (2010) menyatakan bahwa jumlah kemiskinan di Indonesia sebesar 31,02 juta jiwa (13,33%) dimana sebagian besar dari angka tersebut ternyata sebesar 64,23 persen tinggal di daerah pedesaan (Siswosoemarto, 2012).

Kemiskinan yang menyebar begitu luas dipelbagai pelosok negeri, memberikan peluang lahirnya kriminalitas dan anarkisme yang merebak bagaikan penyakit kanker yang mulai menggerogoti keutuhan bangsa.

Jadi globalisasi merupakan upaya yang dianggap akan membawa negara negara di belahan selatan sejajar dan maju sebagaimana yang dirasakan oleh negara di belahan utara. Anggapan yang demikian ternyata bertolak belakang setelah diterapkan dan diberlakukan oleh Bank Dunia, IMF dan WTO. Globalisasi dengan aturan –aturan yang mengikutinya merupakan alat yang paling ampuh untuk menghisap sumber daya alam serta memberikan petaka yang dirasakan oleh seluruh

bangsa. Globalisasi menciptakan kerusakan lingkungan secara sangat parah. Penduduk dibagian negara berkembang menjadi miskin di negerinya sendiri, mereka tidak lagi dapat tinggal di lahan mereka akibat paksaan hidup untuk menjual tanahnya yang memang sudah sempit. Jadi dapat dikatakan bahwa penerapan globalisasi hanya mungkin dilaksanakan oleh negara yang memang mempunyai dana lokal yang sangat besar dan kemampuan negara melindungi diri terhadap tekanan-tekanan yang datang dari negara asing.

#### Daftar Kepustakaan

1. Backman, M. 2008. *Asia Future Shock: Krisis, Gejolak, Peluang, Guncangan dan Ancaman Masa Depan*. Jakarta: Ufuk Press.
2. Fukuyama, F. 2005. *Guncangan Besar: Kodrat Manusia dan Tata Sosial Baru*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
3. Halley, H. 2000. *Globalization and Social Anomie: Problems and Changes on the Way to a New World Order*. SID: Working Paper.
4. Hancock, G. 2005. *Dewa Dewa Pencipta Kemiskinan*. Yogyakarta: PT. Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas (terjemahan).
5. Hill, H. 2001. *Ekonomi Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
6. Nasution, A. 1999. *Globalisasi dan Migrasi Antar Negara*. Bandung: PT. Alumni.
7. Ohmae, K. 1991. *Dunia Tanpa Batas: Kekuatan dan Strategi dalam Ekonomi yang Saling Mengkait*. Jakarta: Binarupa Aksara.
8. Thoha, M. 2001. *Globalisasi: Krisis Ekonomi dan Kebangkitan Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: P2E LIPI.
9. Siswosoemarto, R. 2012. *Intelijen Ekonomi: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
10. Widyamartaya, A. et.al. 2001. *Globalisasi Kemiskinan dan Ketimpangan*. Yogyakarta: PT. Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas.